

## RINGKASAN

Pajak rumah kos merupakan salah satu objek pajak daerah yang termasuk dalam pajak hotel yang merupakan salah satu sumber pajak daerah yang digunakan untuk menyumbang pendapatan daerah. Namun, implementasi kebijakan pemungutan rumah kos masih belum efektif di Kabupaten Banyumas sehingga realisasi penerimaan dari pajak rumah kos masih rendah dan jauh dari harapan pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas.

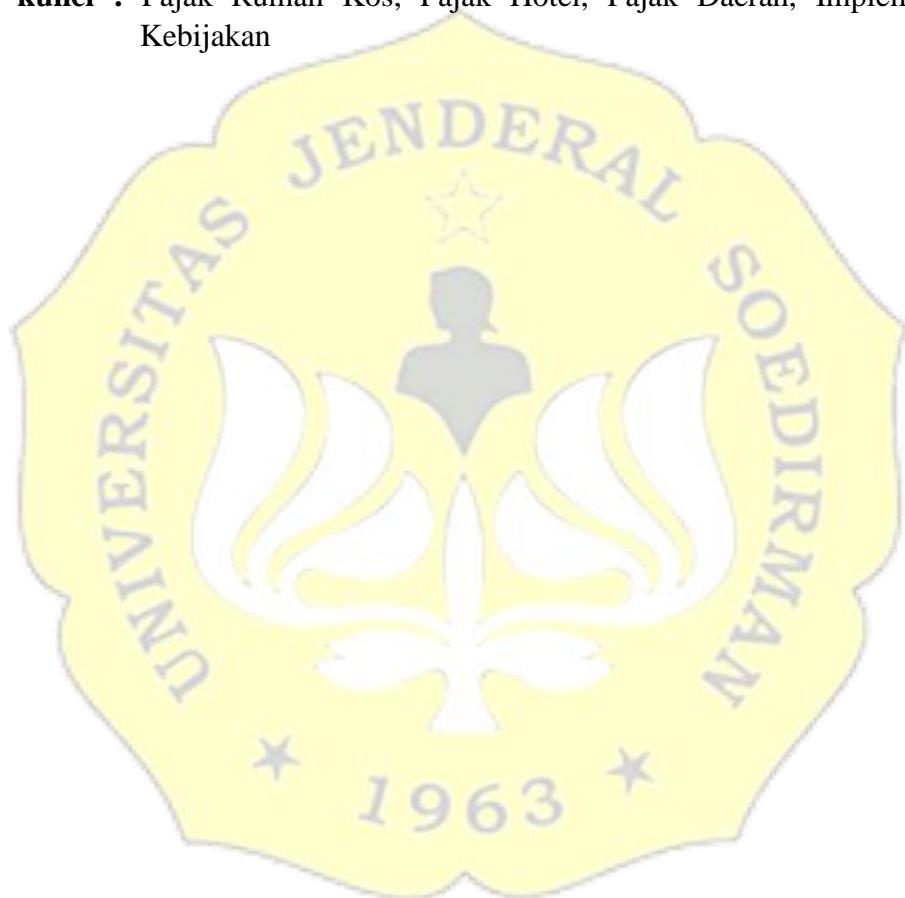
Tujuan Penelitian ini yaitu untuk melihat dan menganalisis alasan kenapa implementasi pajak rumah kos di Kabupaten Banyumas tidak efektif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Narasumber dari penelitian ini yaitu pejabat Bapenda, pemilik rumah kos, dan pemerintahan desa setempat. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman yang aktivitasnya meliputi reduksi data, data *display*, dan *conclusion*.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Sosialisasi mengenai kebijakan pajak rumah kos belum dilakukan secara maksimal, dan kurangnya koordinasi pihak Bapenda dengan pemerintahan desa setempat. (2) Staf yang dimiliki pihak Bapenda dalam menjalankan implementasi kebijakan masih belum memadai dan tidak memiliki staf khusus pemeriksaan, (3) Pihak Bapenda masih belum serius dalam memaksimalkan potensi pajak rumah kos. (4) *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajak rumah kos menjadi kenda realisasi pemungutan pajak rumah karena Bapenda tidak memiliki kendali lebih untuk memungut pajak rumah kos. (5) Kesadaran wajib pajak rumah kos masih sangat rendah di Kabupaten Banyumas. (6) peraturan pajak rumah kos masih belum rinci dan spesifik mengatur tentang pajak rumah kos.

Implikasi dari penelitian ini yaitu: (1) Sosialisasi yang tidak maksimal dan tidak efektif menyebabkan banyaknya pemilik rumah kos yang tidak tau tentang pajak rumah kos sehingga perlu ada sosialisasi berkelanjutan dan intens. Kurangnya koordinasi antar Bapenda menimbulkan proses pendataan menjadi sulit, sehingga perlu adanya kerjasama atau membuat jalur komando serta memberikan kuasa untuk melakukan pendataan maupun pemungutan pajak rumah kos supaya lebih efektif. (2) Kurangnya sumber daya manusia menjadi penghambat untuk memaksimalkan implementasi, oleh karena itu perlu adanya penambahan pegawai dan pembentukan tim khusus pemeriksaan yang kompeten dan bersertifikasi. (3) Belum adanya keseriusan pihak Bapenda untuk mengelola rumah kos menyebabkan proses implementasi menjadi tidak berhasil, sebab itu perlu untuk meningkatkan motivasi para pegawai untuk lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya. (4) Sistem pemungutan *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan rumah kos

perlu dikaji ulang dan mempertimbangkan untuk memberlakukan *official assessment system* supaya realisasi dari implementasi kebijakan lebih efektif. (5) Kurangnya kesadaran wajib pajak menyebabkan proses implementasi menjadi terkendala, pleh karena itu perlu untuk memberikan pemahaman yang baik kepada pemilik rumah kos mengenai fungsi pajak dan manfaat pajak. (6) Peraturan tentang rumah kos perlu dikaji ulang dengan menambahkan indicator yang spesifik tentang pajak rumah kos sehingga tidak menimbulkan persepsi negative diantara wajib pajak rumah kos di Kabupaten Banyumas. Serta menguatkan aspek hukum dan teknis dalam peraturan supaya proses implementasi menjadi lebih efektif.

**Kata kunci :** Pajak Rumah Kos, Pajak Hotel, Pajak Daerah, Implementasi Kebijakan



## SUMMARY

*The boarding house tax is one of the local tax objects that include in the hotel tax which is one of the sources of local taxes used to contribute to regional income. However, the implementation of the boarding house collection policy is still not effective in Banyumas Regency, so that, the realization of revenue from the boarding house tax is still low and far from the expectations of the Banyumas Regency government.*

*The purpose of this study is to see and analyze the reasons why the implementation of the boarding house tax in Banyumas Regency is not effective. The type of research used is descriptive qualitative research. The informants of this research are Bapenda staff, boarding house owners, and local village administrations. Data collection techniques in this research are used semi-structured interviews, observation, and documentation. The data analysis technique in this study uses the Miles and Huberman model whose activities include data reduction, data display, and conclusion.*

*The results of this study indicate that: (1) Socialization of the boarding house tax policy has not been carried out optimally, and there is a lack of coordination between Bapenda and the local village government. (2) The Bapenda staff in carrying out policy implementation is still inadequate and doesn't have special inspection staff, (3) Bapenda is still not serious in maximizing the potential for boarding house taxes. (4) The Self Assessment System as a boarding house tax collection system is an obstacle to the realization of house tax collection because Bapenda does not have more control over collecting boarding house taxes. (5) The awareness of boarding house taxpayers is still very low in Banyumas Regency. (6) boarding house tax regulations are still not detailed and specifically regulate the boarding house tax.*

*The implications of this research are: (1) Socialization that is not optimal and ineffective causes many boarding house owners don't know about the boarding house tax. so that, there needs to be continuous and intense socialization about this policy tax. The lack of coordination between Bapenda makes the data collection process difficult, so there is a need for cooperation or creating a line of command and giving authority to collect data and collect boarding house taxes to be more effective.(2) The lack of human resources is an obstacle to maximizing implementation, therefore it is necessary to add additional employees and the formation of a special inspection team that is competent and certified. (3) The lack of seriousness of the Bapenda to manage boarding houses causes the implementation process to be unsuccessful, therefore it is necessary to increase the motivation of employees to be more optimal in carrying out their duties.(4) The Self Assessment System collection system as a boarding house collection system needs*

*to be reviewed and considered to apply an official assessment system so that the realization of policy implementation is more effective. (5) Lack of awareness of taxpayers causes the implementation process to be constrained, therefore it is necessary to provide a good understanding to boarding house owners regarding the tax function and tax benefits.(6) Regulations on boarding houses need to be reviewed by adding specific indicators on boarding house taxes. so it doesn't cause negative perceptions among boarding house taxpayers in Banyumas Regency. And also strengthening legal and technical aspects in regulations so that the implementation process becomes more effective.*

**Keywords :** Boarding House Tax, Hotel Tax, Local Tax, Implementation Policy.

